



PEMERINTAH KOTA BATAM

RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2024 telah selesai disusun.

Dokumen ini dibuat merupakan amanah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang diharuskan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Kerja secara sistematis terarah, terpadu berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja ini penjabaran dari Renstra Inspektorat Daerah Kota Batam dan RPJMD Kota Batam sesuai dengan Tupoksi yang merupakan sebuah rangkaian kewenangan yang disusun dalam Rencana Kerja Tahunan.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2024 disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dokumen ini sangat penting bagi Pemerintah Kota Batam yang berisikan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan Program Kegiatan, proses penyusunan dilakukan secara sistematis disertai dengan kerangka pendanaan, yang indikatif artinya bahwa informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam Dokumen Renstra yang merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat fleksibel.

Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan penyusunan Rencana Kerja. Semoga Allah selalu membimbing dan memberikan kekuatan kepada kita untuk terus berkarya sehingga Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam dapat tercapai.

Batam, Agustus 2023.

Inspektur Daerah Kota Batam,



Hendriana Gustini, S.Sos.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680824 199008 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-3
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-4
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah.....	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah.....	II-7
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah.....	II-8
2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-9
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-14
BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH	III-1
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah.....	III-3
3.3 Program dan Kegiatan	III-4
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1

Daftar Gambar:

1.2 Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Daftar Tabel:

T-C.29 Trekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023.

T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah.

T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kota Batam.

T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 77 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan, Inspektorat Daerah Kota Batam merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah bertugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

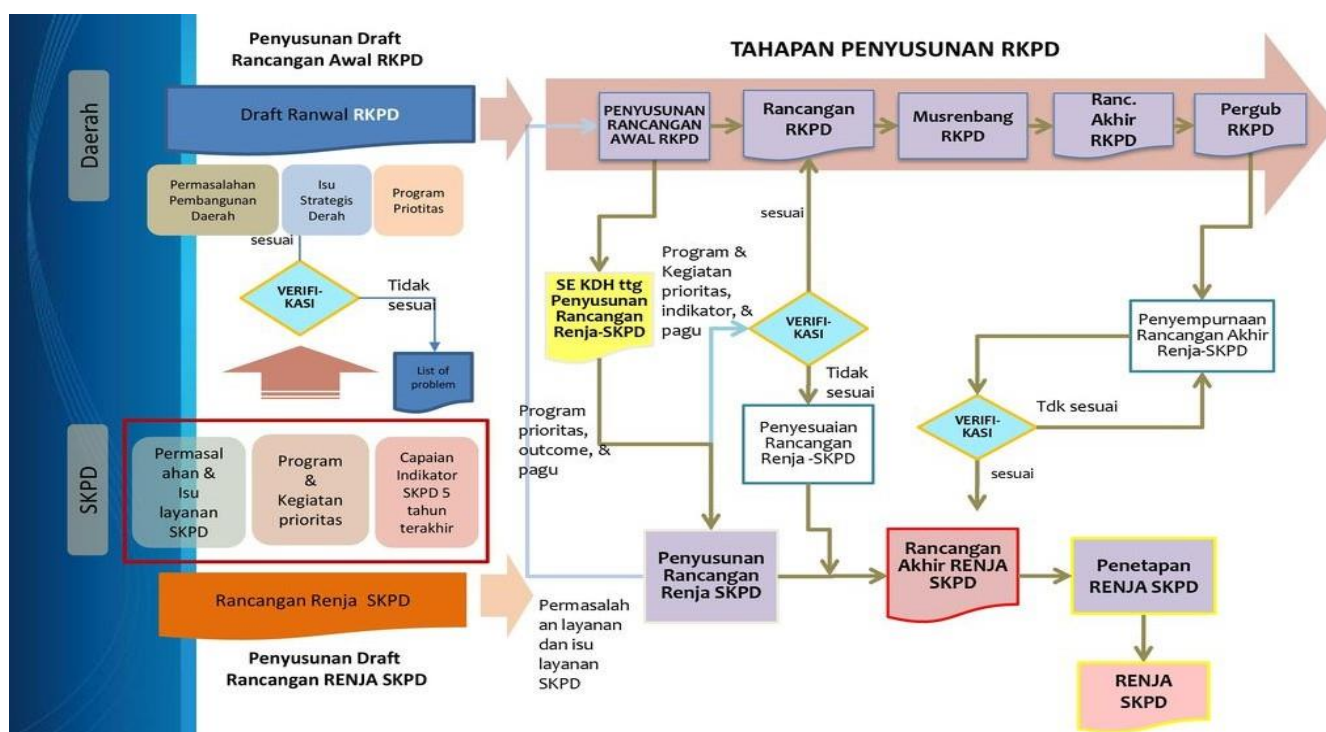
Sesuai peraturan tersebut kedudukan Inspektorat Daerah adalah unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota Batam dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kota Batam.

Inspektorat Daerah merupakan institusi pemeriksa internal yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pengawasan. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah lebih bersifat pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Batam demi tercapainya visi dan misi Pemerintah Kota Batam.

Untuk mewujudkan fungsi pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah maka ditetapkan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2024. Rencana kerja adalah bagian dari kerangka Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis untuk 1 (satu) tahun. Rencana Kinerja merupakan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan selama satu tahun anggaran dan menjadi komitmen yang harus dilaksanakan oleh setiap aparatur Inspektorat Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran strategik yang ditetapkan berisikan indikator pencapaian sasaran dari suatu program dan kebijakan.

Renja Inspektorat memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Tahapan penyusunan Renja dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1.2

Penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 73);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 20231 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 127);
10. Peraturan Walikota Kota Batam Nomor 77 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah,

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 863);

11. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 897);
12. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 234 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1102);
13. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024 (Berita Daerah tahun 2023 nomor 1192).

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan tahunan sebagaimana telah ditargetkan dalam perencanaan lima tahunan yang tertuang dalam Renstra Inspektorat Daerah.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Daerah ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran tentang kondisi umum, evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Inspektorat Daerah di tahun 2024;
2. Memberikan acuan, tolok ukur dan instrumen bagi Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan kegiatan tahunan sehingga terarah dan dapat mencapai sasaran dengan hasil maksimal;
3. Memberi arahan keterkaitan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah agar sinergis, terpadu dan berkesinambungan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Inspektorat Daerah, proses penyusunan Renja Inspektorat Daerah, keterkaitan antara Renja Inspektorat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Inspektorat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Inspektorat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penanggaran Inspektorat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Inspektorat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Inspektorat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Inspektorat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Inspektorat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Inspektorat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Inspektorat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Inspektorat Daerah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah.

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Inspektorat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala Daerah serta capaian program nasional NSPK, SPM, dan SGDs (*Sustainable Development Goals*). Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Reviu Awal Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Terhadap rancangan awal RKPD membandingkan antar rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan belanja perangkat daerah.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Penjelasan tentang bagaimana proses usulan program/kegiatan para Pemangku kepentingan tersebut diperoleh dan diakomodir.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berisi tentang penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Inspektorat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah.

Untuk dapat mengukur keberhasilan dan implementasi Rencana Strategis Tahun 2021-2026 ditetapkan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, serta pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran, yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja. Penetapan indikator kinerja kegiatan berdasarkan pada kelompok masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan pembangunan Kota Batam tahun 2021-2026, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja tahun 2024. Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana kerja disesuaikan dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dimana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sudah ditentukan oleh peraturan ini.

Untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan tahun 2023, telah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah, dalam APBD Kota Batam tahun 2023 sebesar Rp27.248.548.049,00

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp24,070,268,334,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp22,925,451,123,00 dengan persentase sebesar 95.24%.
- b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp129,294,000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp113,184,443,00 dengan persentase sebesar 87.54%.
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp189,849,740,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp167,718,200,00 dengan persentase sebesar 88.34 %.

- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp200,810,000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp194,000,000,00 dengan persentase sebesar 96.61 %.
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp129,579,680,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp121,237,890,00 dengan persentase sebesar 93.56 %.
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp241,365,000,00 dan realisasi keuangan per November sebesar Rp232,620,700,00 dengan persentase sebesar 96.38 %.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp208.530.000,00 dan realisasi sebesar Rp193,919,000,00 dengan persentase sebesar 92,99 %.
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp63.458.500,00 dan realisasi sebesar Rp56.218.000,00 dengan persentase sebesar 88.59%.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

- a. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp365.031.450,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp339.852.000,00 atau 93.10%.

Rekapitulasi Evaluasi terhadap capaian kinerja program dan kegiatan diarahkan terhadap indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari: *input*, *output* dan *outcome*. Hasil evaluasi kinerja kegiatan menunjukkan capaian kinerja dari sebagian besar kegiatan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing- masing indikator kinerja sasaran. Tingkat capaian kinerja masing- masing indikator tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kota Batam
Provinsi Kepulauan Riau

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Kota Batam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = (7/6))	(9)	(10 (5+7+9))	(11 = (10/4))
	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar									
	Bidang/Urusan Pengawasan									
6.	01.	01.								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	-	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/Bulan	-	79 orang/bulan	79 orang/bulan	100%	90 Orang/Bulan	79 Orang/Bulan	92,94%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	85 orang	-	79 orang	79 orang	100%	81 orang	79 orang	92,94%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	-	-	100%	100%	100%	100 %	110 %
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	-	-	-	-	1 Paket	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	-	0 Paket	0 Paket	-	3 Paket	3 Paket	100%

				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	-	0 Paket	0 Paket	-	1 Paket	1 Paket	100 %
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	-	0 Paket	0 Paket	-	-	2 Paket	100 %
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	-	-	-	-	1 Paket	1 Paket	100 %
				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	-	-	-	-	-	-	100%
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100 %
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	-	100%	100%	-	100%	100%	100%
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 paket	-	2 paket -	2 paket -	100%	-	2 paket	100 %
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	-	5 unit	5 unit	100%	-	5 unit	100 %
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 unit	-	-	-	-	-	6 unit	100%
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	-	-	-	-	-	5 unit	100%
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	-	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100 %
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	-	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100 %
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	-	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100 %
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	-	100%	100%	-	100%	100%	100%
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	-	8 Unit	8 Unit	100%	8 Unit	8 Unit	100 %
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	45 Unit	-	45 Unit	45 Unit	100%	45 Unit	45 Unit	100 %

				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	0 Unit	0 Unit	-	-	1 Unit	100 %
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	-	0 Unit	0 Unit	-	-	1 Unit	100 %
0	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti	93%	-	87%	89%	102%	88%	93%	100%
			2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase SKPD yang menindak lanjuti Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal	100%	-	100%	100%	-	100%	100%	100%
			0006	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
					Persentase Pemenuhan Area Proses Kunci Kapabilitas APIP	100%	-	100%	100%		100%	100%	100%
			0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	12 laporan	-	43 Laporan	43 Laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100 %
			0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1 laporan	-	43 Laporan	43 Laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100 %
			0003	Review Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	12 laporan	-	43 Laporan	43 Laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100 %
			0004	Review Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2 laporan	-	43 Laporan	43 Laporan	100%	2 laporan	2 laporan	100 %
			0006	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	-	1 Kesepakatan	0 Kesepakatan	0 %	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	100 %
6	01	02	2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase SKPD yang tidak terdapat temuan kerugian Negara/Daerah	86%	-	70%	91%	91%	82%	86%	100%
				Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 laporan	-	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100 %
				Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1 laporan	-	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100 %
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase SKPD yang mengimplementasikan SPIP Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	-	-	-	-	-	1 Rekomendasi	100%
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	-	-	-	-	-	1 Rekomendasi	100%
				Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Persentase SKPD yang telah menindaklanjuti hasil pendampingan dan asistensi	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	43 Perangkat Daerah	-				43 Perangkat Daerah	43 Perangkat Daerah	100 %
				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	43 Perangkat Daerah	-	43 Perangkat Daerah	43 Perangkat Daerah	100%	43 Perangkat Daerah	43 Perangkat Daerah	100 %
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 kegiatan	-	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	43 Perangkat Daerah	2 kegiatan	100 %
				Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	43 Perangkat Daerah	-	0 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	0%	43 Perangkat Daerah	43 Perangkat Daerah	100 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah.

Pelaksanaan kebijakan strategis pemberantasan korupsi didasarkan pada amanat Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 -2025. Berdasarkan peraturan tersebut, tugas Pemerintah Daerah yang pertama adalah menjabarkan dan melaksanakan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) melalui aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi yang ditetapkan setiap tahun. Tugas Pemerintah Daerah yang kedua, adalah menyampaikan laporan pencapaian pelaksanaan aksi PPK sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan Kementerian/Badan yang membidangi urusan perencanaan pembangunan nasional.

Indikator kinerja sasaran Inspektorat Daerah sebagaimana tertuang dalam Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026 ada 5 (lima) indikator sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah, yaitu: (1) Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan (2) Persentase SKPD dengan SAKIP Mencapai Nilai minimal BB dari Hasil Evaluasi Inspektorat (3) Nilai Kapabilitas APIP (4) Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi (5) Persentase SKPD yang Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) mendapat nilai minimal B.

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Indikator Tujuan/Sasaran	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2022 (n-2)	2023 (n-1)	2024 (n)	2025 (n+1)	2022	2023	2024	2025	
1. Tingkat Maturitas SPIP			Level 3 (3.1000)	Level 3 (3.1500)	Level 3 (3.2000)	Level 3 (3.2500)	Level 3 (3.1000)	-	Level 3 (3.2500)	Level 3 (3.3000)	
2. Persentase SKPD dengan SAKIP mencapai minimal nilai BB dar Hasil Evaluasi Inspektorat			70%	81%	86%	93%	86,04%	-	86%	93%	
3. Nilai Kapanilitas APIP			Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	-	Level 3	Level 3	
4. Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi			81%	82%	83%	84%	88%	-	83%	84%	

Indikator Tujuan/Sasaran	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		
5. Persentase SKPD yang Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) mendapat nilai minimal B.			77%	81%	86%	93%	81%	-	86%	93%	
6. Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan.			83,20	83,40	83,60	83,80	86%	-	83,60	83,80	
7. Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
8. Persentase rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindak lanjuti			87%	88%	89%	90%	89%	-	89%	90%	
9. Persentase SKPD yang mengimplementasikan SPIP, Reformasi Birokrasi, dan Penegakan Integritas			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

Adapun isu-isu strategis yang diangkat dalam rangka penyelenggaraan tugas Inspektorat Daerah Tahun 2021 – 2026:

1. Masih kurangnya keahlian dan kompetensi SDM di lingkungan Inspektorat;
2. Belum terpenuhinya formasi tenaga Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD);
3. Minimnya dukungan anggaran untuk peningkatan sarana prasarana, pelatihan dan pendidikan di lingkungan Inspektorat.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel T-C. 31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kota Batam

OPD: **Inspektorat Daerah**

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	INSPEKTORAT DAERAH				29,898,010,242					46.634.164.673	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	28,917,674,888	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	43.271.770.673	
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	26.155.376.828	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		32.041.562.909	
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Kota Batam</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>85 Orang/Bulan</i>	<i>26.094.944.568</i>	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Kota Batam</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>85 Orang/Bulan</i>	<i>31.987.412.909</i>	
	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Kota Batam</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>9 Dokumen</i>	<i>60.432.260</i>	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Kota Batam</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>54.150.000,00</i>	
2	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	1,072,568,000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	2.254.131.000	
	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<i>Kota Batam</i>	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<i>1 Paket</i>	<i>48.750.000</i>	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<i>Kota Batam</i>	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<i>1 Paket</i>	<i>68.240.000</i>	
	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Kota Batam</i>	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	<i>85 orang</i>	<i>1.023.818.000</i>	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Kota Batam</i>	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	<i>85 orang</i>	<i>2.185.891.000</i>	
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	634,090,540	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	3.862.822.500	
	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan</i>	<i>Kota Batam</i>	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan</i>	<i>1 Paket</i>	<i>7.172.264</i>	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan</i>	<i>Kota Batam</i>	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan</i>	<i>1 Paket</i>	<i>34.800.000</i>	

	Kantor		Bangunan Kantor yang Disediakan			Kantor		Kantor yang Disediakan			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	149.834.026	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1.618.003.500	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.444.593	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	90.770.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	18.094.532	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	51.372.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Batam	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.807.339	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Batam	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	35.000.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Kota Batam	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	193.028.000	Penyediaan Bahan/Material	Kota Batam	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	-	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	251.709.786	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	2.032.877.000	
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%	309,570,000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%	4.680.772.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	2.212.490.000	
	Pengadaan Mebel	Kota Batam	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	90.765.000	Pengadaan Mebel	Kota Batam	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	815.908.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	25.410.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	1.652.374.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Batam	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	100.395.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Batam	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Batam	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	93.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Batam	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	170,369,520	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	135.412.264	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	18.256.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	13.030.800	

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	82.422.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	36.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	69.691.520	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	86.381.464	
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	575,700,000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	297.070.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	85.769.520	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	218.840.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	45 Unit	54.600.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	45 Unit	37.950.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	250.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0 Unit	-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	185.330.480	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0 Unit	-	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Persentase Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti	89%	424,406,883	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Persentase Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti	89%	1.123.636.000	
7	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Persentase SKPD yang menindak lanjuti Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal	100%	331.361.918	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Persentase SKPD yang menindak lanjuti Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal	100%	798.878.000	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 dokumen	12.136.975	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 dokumen	51.790.000	
			Persentase Pemenuhan Area Proses Kunci Kapabilitas	100%		Persentase Pemenuhan Area Proses Kunci Kapabilitas		Persentase Pemenuhan Area Proses Kunci Kapabilitas APIP	100%		

			APIP			APIP					
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	12 Laporan	41.518.091	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	12 Laporan	214.959.000	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan	20.520.813	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan	73.710.000	
9	Reviu Laporan Kinerja	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	12 Laporan	132.804.306	Reviu Laporan Kinerja	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	18 Laporan	34.860.000	
	Reviu Laporan Keuangan	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2 Laporan	65.435.449	Reviu Laporan Keuangan	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2 Laporan	28.020.000	
	Kerjasama Pengawasan Internal	Kota Batam	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	58.946.284	Kerjasama Pengawasan Internal	Kota Batam	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	395.539.000	
10	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Persentase SKPD yang tidak terdapat temuan kerugian Negara/Daerah	79%	93,044,965	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Persentase SKPD yang tidak terdapat temuan kerugian Negara/Daerah	79%	324.758.000	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang Ditangani	1 Laporan	57.593.419	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang Ditangani	1 Laporan	166.214.000	
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1 Laporan	35.451.546	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	2 Laporan	158.544.000	
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase SKPD yang mengimplementasikan SPIP, Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas	100%	555,928,471	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase SKPD yang mengimplementasikan SPIP, Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas	100%	2.238.758.000	
11	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Persentase Kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan	100%	75,000,000	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Persentase Kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan	100%	361.423.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kota Batam	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 rekomendasi	42.652.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kota Batam	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 rekomendasi	172.241.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kota Batam	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 rekomendasi	32.348.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kota Batam	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 rekomendasi	189.182.000	
12	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi		Persentase SKPD yang telah menindaklanjuti hasil pendampingan dan asistensi	100%	480,928,471	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi		Persentase SKPD yang telah menindaklanjuti hasil pendampingan dan asistensi	100%	1.877.335.000	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan	43 Perangkat Daerah	81.282.978	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	43 Perangkat Daerah	209.946.000	

			<i>Daerah</i>								
	<i>Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi</i>	<i>Kota Batam</i>	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi</i>	<i>2 Kegiatan</i>	<i>33.626.919</i>	<i>Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi</i>	<i>Kota Batam</i>	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi</i>	<i>43 Perangkat Daerah</i>	<i>168.284.000</i>	
	<i>Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>	<i>Kota Batam</i>	<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>	<i>43 Perangkat Daerah</i>	<i>279.133.637</i>	<i>Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>	<i>Kota Batam</i>	<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>	<i>2 Kegiatan</i>	<i>1.306.659.000</i>	
	<i>Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</i>	<i>Kota Batam</i>	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</i>	<i>43 Perangkat Daerah</i>	<i>86.884.937</i>	<i>Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</i>	<i>Kota Batam</i>	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</i>	<i>43 Perangkat Daerah</i>	<i>192.446.000</i>	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah.

Usulan program dan kegiatan tersebut diperoleh berdasarkan masih banyaknya pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik yang dilaksanakan oleh OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Namun untuk Tahun Anggaran 2024, tidak ada program dan kegiatan yang berdasarkan usulan dari masyarakat, program dan kegiatan diusulkan dalam rangka memenuhi amanah Permendagri Nomor 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
			n i h i i		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembinaan dan Pengawasan secara nasional tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan Penyelenggaraan Pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh:

- a. Provinsi, dilaksanakan oleh:
 1. Menteri, untuk pembinaan umum.
 2. Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, untuk pembinaan teknis.
- b. Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pembinaan umum dan teknis.

Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi:

- a. Pembagian urusan pemerintahan;
- b. Kelembagaan daerah;
- c. Kepegawaian pada perangkat daerah;
- d. Keuangan daerah;
- e. Pembangunan daerah;
- f. Pelayanan publik di daerah;
- g. Kerja sama daerah;
- h. Kebijakan daerah;
- i. Kepala daerah dan DPRD;
- j. Bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan teknis dilakukan terhadap teknis pelaksanaan substansi urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah provinsi dan pengawasan teknis dilakukan terhadap teknis pelaksanaan substansi urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah kabupaten/kota.

Pengawasan teknis meliputi:

- a. Capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar;
- b. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, operasi, dan kriteria, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren;
- c. Dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- d. Akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren.

Selain melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Menteri dan Menteri teknis/kepala Lembaga non kementerian sesuai dengan kewenangannya masing-masing melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengawasan yang menjadi tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Dalam melakukan pengawasan, Gubernur dibantu oleh perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri teknis dan kepala pemerintahan non kementerian dalam melakukan pengawasan teknis sesuai dengan kewenangan masing-masing berkoordinasi dengan Menteri. Dalam pengawasan umum terdapat keterkaitan dengan kewenangan pengawasan teknis, Menteri mengadakan koordinasi dengan Menteri teknis/kepala Lembaga pemerintahan non kementerian. Koordinasi dilakukan dalam aspek perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Pengawasan umum dan teknis dilakukan dalam bentuk reu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya. Pengawasan dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki

terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsidan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh APIP dilaksanakan berdasarkan dengan prinsip:

- a. Professional;
- b. Independen;
- c. Objektif;
- d. Tidak tumpang tindih antar APIP; dan
- e. Berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini.

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan APIP dilakukan pada tahap kegiatan:

- a. Penyusun dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
- b. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Pelaksanaan program strategis nasional di daerah;
- d. Berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
- e. Pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Inspektorat Daerah

Tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kota Batam merupakan penjabaran lebih teknis dari pernyataan Visi dan Misi. Melalui tujuan diharapkan dapat diketahui kinerja apa yang diharapkan dapat diwujudkan dari pernyataan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran dapat menspesifikasi indikasi dari keberhasilan kinerja dimasing-masing tujuan. Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Daerah merumuskan tujuan yang terkait dengan misi, yaitu :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
2. Mewujudkan Pelayanan dan penyelesaian atas pengaduan masyarakat ;
3. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kota

Batam;

4. Meningkatkan kepatuhan SKPD terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Meningkatkan Kualitas Aparatur Pengawasan Internal.

Selanjutnya, untuk mencapai hasil yang optimal yang ingin dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Daerah merumuskan tujuan, sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut :

TUJUAN : Meningkatkan peran Inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas.

SASARAN :

- I. Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dengan indikator:
 - Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretarian
- II. Meningkatnya Pengawasan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator:
 - Persentase SKPD dengan SAKIP mencapai nilai minimal BB dari Hasil Evaluasi Inspektorat.
 - Nilai Kapabilitas APIP.
- III. Meningkatnya Kelembagaan SKPD dalam Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas, dengan indikator:
 - Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi.
 - Persentase SKPD yang Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) mendapat nilai minimal B.

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Batam yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan

diselesaikan oleh Inspektorat Daerah Kota Batam dalam satu tahun mendatang. Rumusan rincian program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Kota Batam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	INSPEKTORAT				46.634.164.673				42.686.545.818
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah		100%	43.271.770.673			100%	41.672.036.089
	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi</i>	Batam	100%	32.041.562.909	APBD		100%	38.966.810.277
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>		85 Orang/bulan	31.987.412.9009			85 Orang/bulan	38.900.406.297
	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>		12 Dokumen	54.150.000			12 Dokumen	66.403.980
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Batam	100%	2.254.131.000	APBD		100%	1.071.682.420
	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>		1 Paket	68.240.000			1 Paket	56.857.125
	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>		90 Orang	2.185.891.000			85 Orang	1.014.825.295
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Batam	100%	3.862.822.500	APBD		100%	431.566.835
	<i>Penyediaan Komponen Instalasi</i>	<i>Jumlah Paket Komponen</i>		1 Paket	34.800.000			1 Paket	7.817.767

	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan							
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	1.618.003.500			3 Paket	101.319.088
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	90.770.000			1 Paket	5.934.607
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2 Paket	51.372.000			2 Paket	18.275.478
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	35.000.000			1 Paket	7.807.000
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		0 Paket	-	-	-	1 Paket	100.113.071
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	2.032.877.000			76 Laporan	190.299.824
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	Batam	100%	4.680.772.000	APBD		100%	789.948.704
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		7 Unit	2.212.490.000			7 Unit	2.526.594.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		2 Paket	815.908.000			2 Paket	229.734.223
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		5 Unit	1.652.374.000			24 Unit	250.188.845
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-	0			6 Unit	174.945.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-	0			5 Unit	135.080.636
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	100%	135.412.264	APBD		100%	143.930.996
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	13.030.800			12 Laporan	14.899.040
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan		12 Laporan	36.000.000			12 Laporan	70.839.980

		Perlengkapan Kantor yang Disediakan							
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	86.381.464			12 Laporan	58.191.976
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Batam	100%	297.070.000	APBD		100%	268.096.857
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1 Unit	40.280.000			8 Unit	168.256.877
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		8 Unit	218.840.000			-	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		80 Unit	37.950.000			80 Unit	99.839.980
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		1 Unit	-			-	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		1 Unit	-			-	-
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti		89 %	1.123.636.000			90 %	440.067.497
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.Persentase SKPD yang menindak lanjuti Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal 2.Persentase Pemenuhan Area Proses Kunci Kapabilitas APIP	Batam	100%	798.878.000,00	APBD		100%	343.589.172
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		12 Laporan	214.959.000			30 Laporan	53.157.273
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		1 Laporan	73.710.000			1 Laporan	29.277.685

	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja		12 Laporan	34.860.000			25 Laporan	116.622.594
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan		2 Laporan	28.020.000			2 Laporan	81.104.039
	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk		1 Kesepakatan	395.539.000			1 Kesepakatan	50.842.751
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		2 Dokumen	51.790.000			2 Dokumen	12.584.830
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase SKPD yang tidak terdapat temuan kerugian Negara/Daerah	Batam	84 %	324.758.000,00	APBD		89 %	96.478.325
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani		1 Laporan	166.214.000			1 Laporan	62.776.826
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		2 Laporan	158.544.000			2 Laporan	33.701.499
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase SKPD yang mengimplementasikan SPIP, Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas		100%	2.238.758.000			100%	576.442.232
	Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan		100%	361.423.000	APBD		100%	80.536.024
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun		1 Rekomendasi	172.241.000			1 Rekomendasi	43.783.720
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun		1 Rekomendasi	189.182.000			1 Rekomendasi	36.752.304
	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Persentase SKPD yang telah menindaklanjuti hasil pendampingan dan asistensi	Batam	100 %	1.877.335.000	APBD		100 %	495.906.208
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		43 Perangkat Daerah	209.946.000			43 Perangkat Daerah	81.598.446

	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		43 Perangkat Daerah	168.284.000			43 Perangkat Daerah	30.743.042
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		2 kegiatan	1.306.659.000			2 kegiatan	280.215.665
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		43 Perangkat Daerah	192.446.000			43 Perangkat Daerah	103.349.055
TOTAL :					46.634.164.673				42.688.545.818

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH

Rincian kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Inspektorat Daerah Kota Batam tahun 2024 yang pelaksanaan dan pembiayaannya bersumber dari dana APBD Kota Batam adalah sebagai berikut:

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Batam
Tahun 2024

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
		INSPEKTORAT DAERAH								46.634.164.673,00				44.845.781.111,00		
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								46.634.164.673,00				44.845.781.111,00		
6	01	INSPEKTORAT DAERAH								46.634.164.673,00				44.845.781.111,00		
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								43.271.770.673,00				43.829.271.382,00	
6	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								32.041.562.909,00			38.966.810.277,00	
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
					Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan Daerah Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 %	85 Orang/bulan	100 %	31.987.412.909,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/bulan	38.900.406.297,00
6	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
					Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan Daerah Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 %	12 Dokumen	100 %	54.150.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	66.403.980,00
6	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								2.254.131.000,00			1.071.682.420,00	
6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
					Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan Daerah Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 %	1 Paket	100 %	68.240.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	56.857.125,00
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
					Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan Daerah Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 %	85 Orang	100 %	2.185.891.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	85 Orang	1.014.825.295,00
6	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								3.862.822.500,00			331.453.764,00	
6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
					Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan Daerah Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 %	1 Paket	100 %	34.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.817.767,00
6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											

					Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan Daerah Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 %	3 Paket	100 %	1.618.003.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	101.319.088,00
6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
					Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan Daerah Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 %	1 Paket	100 %	90.770.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.934.607,00
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
					Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan Daerah Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 %	2 Paket	100 %	51.372.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	18.275.478,00
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
					Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan Daerah Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 %	1 Paket	100 %	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.807.000,00
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
					Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan Daerah Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 %	12 Laporan	100 %	2.032.877.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	190.299.824,00
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
												4.680.772.000,00					3.006.517.068,00
6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
					Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan Daerah Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 %	7 Unit	100 %	2.212.490.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	2.526.594.000,00
6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
					Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan Daerah Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 %	2 Unit	100 %	815.908.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	229.734.223,00
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
					Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan Daerah Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 %	5 Unit	100 %	1.652.374.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	250.188.845,00
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
												135.412.264,00					143.930.996,00
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												

					Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan Daerah Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 %	12 Laporan	100 %	13.030.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	14.899.040,00				
6	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
					Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan Daerah Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 %	12 Laporan	100 %	36.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	70.839.980,00				
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
					Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan Daerah Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 %	12 Laporan	100 %	86.381.464,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	58.191.976,00				
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												297.070.000,00				308.876.857,00
6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
					Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 %	1 Unit	100 %	40.280.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40.780.000,00				
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
					Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 %	8 Unit	100 %	218.840.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	168.256.877,00				
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
					Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 %	80 Unit	100 %	37.950.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	99.839.980,00				
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN												1.123.636.000,00				440.067.497,00
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal												798.878.000,00				343.589.172,00
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																
					Persentase Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Area Proses Kunci Kapabilitas APIP Persentase SKPD yang menindak lanjuti Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89 %	7 Laporan	100 % 100 %	214.959.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	7 Laporan	53.157.273,00				
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																

						Persentase Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Area Proses Kunci Kapabilitas APIP Persentase SKPD yang menindak lanjuti Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89 %	1 Laporan	100 % 100 %	73.710.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan	29.277.685,00				
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja																	
						Persentase Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Persentase Pemenuhan Area Proses Kunci Kapabilitas APIP Persentase SKPD yang menindak lanjuti Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89 %	18 Laporan	100 % 100 %	34.860.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	18 Laporan	116.622.594,00				
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan																	
						Persentase Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Persentase Pemenuhan Area Proses Kunci Kapabilitas APIP Persentase SKPD yang menindak lanjuti Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89 %	2 Laporan	100 % 100 %	28.020.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2 Laporan	81.104.039,00				
6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																	
						Persentase Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Persentase Pemenuhan Area Proses Kunci Kapabilitas APIP Persentase SKPD yang menindak lanjuti Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89 %	1 Kesepakatan	100 % 100 %	395.539.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	50.842.751,00				
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																	
						Persentase Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Pemenuhan Area Proses Kunci Kapabilitas APIP Persentase SKPD yang menindak lanjuti Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89 %	2 Dokumen	100 % 100 %	51.790.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	12.584.830,00				
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu													324.758.000,00				96.478.325,00
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																	
						Persentase Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Persentase SKPD yang tidak terdapat temuan kerugian Negara/Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89 %	1 Laporan	79 %	166.214.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	62.776.826,00				
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																	

5.1 Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian

Dalam pencapaian keberhasilan untuk mewujudkan Visi “Terwujudnya Batam sebagai bandar dunia madani yang modern dan sejahtera” maka perlu adanya komitmen, semangat, kemauan dan tekad bersama agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Penyusunan serta penetapan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja 2024 untuk mencapai target pembangunan yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra, Renja Tahunan Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2024 disusun sebagai wujud dukungan kepada Pemerintah Kota Batam di bidang pengawasan akan mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Dokumen perencanaan ini diharapkan dapat memberikan arah dalam melakukan Perencanaan Pembangunan dimasa yang akan datang, dan dengan ditetapkannya Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2024 ini diharapkan kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Batam dapat berjalan dengan baik.

Demikian Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2024 ini dibuat, semoga dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.